

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

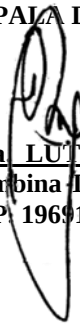
Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2018 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2018 sudah optimal dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) ini. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan kinerja (LKj) ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di tahun – tahun berikutnya.

KEPALA DINAS,


Dra. LUTHPIAH
Pembina Tk.I
NIP. 19691215 198908 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
1.3 Isu-Isu Strategi yang Berpengaruh.....	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	29
2.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi.....	29
2.2 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja	30
2.3 Program dan Kegiatan	35
2.4 Perencanaan Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian kinerja Organisasi	43
3.2 Analisis Capaian Kinerja	44
3.3 Pencapaian Kinerja Lainnya.....	62
3.4 Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	92
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah OPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menyangkut tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi.

Sebagai pengemban amanah, DP3AP2 Provinsi Jambi berkewajiban menyusun laporan Kinerja (LKj) sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang telah diraih maupun hambatan yang ditemui dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntunan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja pemerintahan khususnya dalam menyelenggaraan pemerintahan yang good governance sebagai prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dan tujuan serta cita-cita bangsa dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan keadilan. Terkait hal tersebut, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja pada seluruh instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pemerintah yang berperan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk di wilayah Provinsi Jambi, dipandang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

1.2 Gambaran Organisasi

1.2.1. Struktur Organisasi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

- a. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya,

dan

- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu ;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan;
- d. Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- c. Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program

Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan, program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyiapan data untuk penyusunan program Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. Pelaksanaan Monitoring; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;

- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok:

Membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;

- g. Penyusunan data perlindungan perempuan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Tugas Pokok :
- Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- Fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - g. Penyusunan data bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- Tugas Pokok:
- Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan

Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - g. Penyusunan data bidang pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu Dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.

3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan data Perlindungan Anak;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak

Tugas Pokok :

Membantu bidang Perlindungan anak dalam Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- g. Penyusunan data bidang Permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternatif anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok:

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di Bidang

Tumbuh Kembang Anak;

- d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- g. Penyusunan data Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;

- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitas penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum

desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan

Desa serta Kelurahan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

. Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan Masyarakat desa.
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dalam

rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan

pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
- Tugas Pokok:
- Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan

Perdesaan.

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan

sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- Tugas Pokok:
- Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan TTG, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Keluarga Berencana;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Seksi Kesehatan Reproduksi.

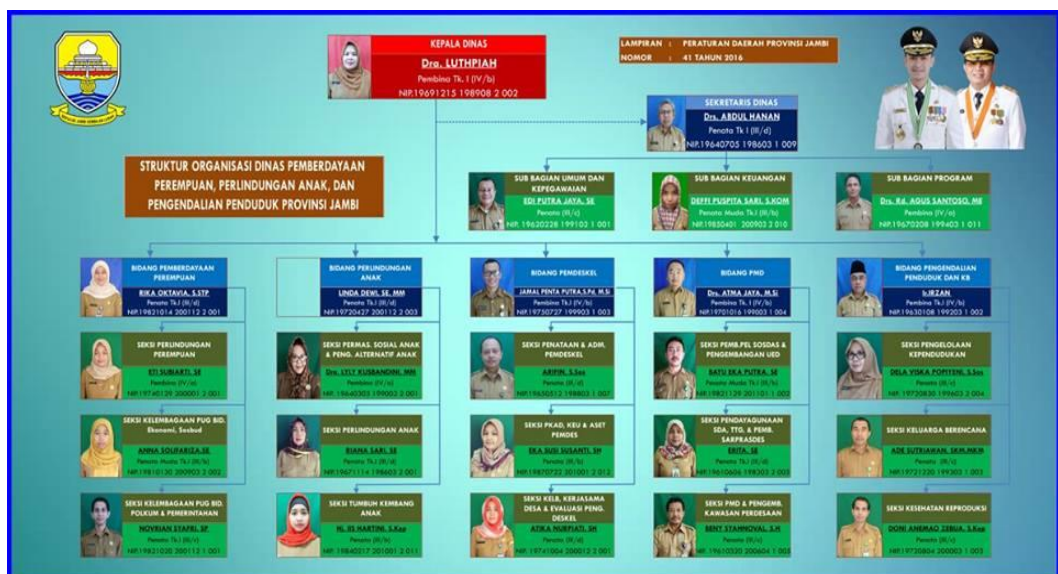
Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi khusus, dan masalah lainnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informasi layanan;
- e. Penyiapan dukungan umum pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Seksi Pengaduan

Mempunyai tugas membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan , dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengaduan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan;
- b. Pengidentifikasi dan klarifikasi pengaduan;
- c. Pemantauan dan penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- e. Pengelolaan call center pengaduan;
- f. Perlindungan korban di penampungan sementara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi tindak Lanjut

Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh kepala UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tindak Lanjut memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- b. Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- c. Pelayanan mediasi;
- d. Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi (per 31 Desember 2018), berjumlah 84 (delapan puluh empat orang). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	4	5
2	Golongan III	26	38	64
3	Golongan IV	7	8	15

1.2.3.Sarana dan Prasarana (asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2018 terdapat 170 aset dengan kondisi rusak. Pada Tabel 1.2 menjelaskan kondisi aset DP3AP2 Provinsi Jambi pada tahun 2018.

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda Motor	11	1	12
2	Jam Ukur (Meet Lock)	-	2	2
3	Handycam	2	2	4
4	Prople Proyek Toyo Seri	-	1	1
5	Mesin Tik Manual Portab	-	2	2
6	Lemari Besi	10	1	11
7	Rak Besi	-	1	1
8	Filling Besi/Metal	20	5	25
9	Lemari Kaca	4	1	5
10	Lemari Kayu	-	4	4
11	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8	8	16
12	Zice	1	14	15
13	Tempat Tidur Kayu	-	1	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
14	Meja Tulis	3	1	4
15	Meja Tik	-	3	3
16	Kursi Rapat	237	2	239
17	Kursi Tangan	41	1	42
18	Kursi Putar	52	6	58
19	Kursi Biasa	2	11	13
20	Kursi Lipat	50	32	82
21	Meja Komputer	-	1	1
22	Meja Biro	77	4	82
23	AC Split	19	2	21
24	Kipas Angin	10	17	27
25	TV	1	1	2
26	Stabiliser	-	1	1
27	Lb. Garuda Pancasila	-	1	1
28	Gbr. Presiden dan Wapres	-	1	1
29	PC Unit	-	2	2
30	CPU	-	2	2
31	Printer	-	9	9
32	Buffet Kayu	-	1	1
33	Audio Monitor Active	-	1	1
34	Foto Tustel	-	1	1
35	Pesawat Telepon	-	7	7
36	Facsimile	-	4	4
37	Dispenser+galon	8	2	11
38	Printer Dot Matrix	1	1	2
39	Unit UPS	12	12	24
40	Mesin Absensi	-	1	1
41	Mini Bus	11	-	11
42	Meja Rapat	36	-	36
43	Meja Balkon	1	-	1
44	Kursi Tamu	10	-	10
45	Sice Tamu Ruang Kaban	1	-	1
46	Podium	1	-	1
47	Lemari Arsip	22	-	22
48	Brankas	1	-	1
49	Laptop	18	-	18
50	Speaker Active	1	-	1
51	Printer Inject Colour	31	-	31
52	Jam Dinding	8	-	8
53	Hordeng	458	-	458
54	Karpet Mushalla	2	-	2
55	Sarung Kursi Rapat	100	-	100
56	Deploy Meja Rapat	81	-	81
57	Komputer	24	-	24
58	Papan Data	2	-	2
59	Umbul-Umbul	30	-	30

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
60	Tempat Tidur	1	-	1
61	Tabung Gas	1	-	1
62	Gedung Kantor	1	-	1

1.3 Isu-isu Strategi Yang Berpengaruh

Isu-isu yang berpengaruh terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1.3.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-isu yang berpengaruh terhadap bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1. Tingginya korban kekerasan pada anak;
2. Tingginya kasus kekerasan perempuan;
3. Anggaran yang terbatas untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Masih kurangnya peran forum anak;
5. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
7. Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
8. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
9. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
10. Belum semua PD melaksanakan PPRG;
11. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
12. Belum optimalnya Program PATBM;
13. Tingginya pekerja anak;
14. Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
15. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
16. Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
17. Ditemukannya TPPO;
18. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.

1.3.3. Pengendalian Penduduk

Isu-isu yang berpengaruh terhadap bidang Pengendalian Penduduk dan KB dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;

2. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed);
3. pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
4. Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro;
5. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB.

1.3.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Isu-isu yang berpengaruh terhadap bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah dan Desa/Kelurahan dapat dilihat berdasarkan bidang tugas nya, antara lain :

1. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
2. Masih kurangnya pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
3. Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
4. Masih banyak aparat desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa;
5. Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
6. Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
7. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
8. Belum optimalnya TTG;
9. Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik);
10. Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa;;
11. Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
12. Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM.

Selain itu dapat juga memperhatikan permasalahan dan capaian yang dapat diperhatikan melalui beberapa faktor dan indikator dari beberapa bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, antara lain :

1. Persaingan desa dengan mengaktifkan berbagai kondisi yang menggambarkan dengan indikator yang mencakup 5 (lima) Dimensi yaitu:
 - a. Pelayanan Dasar.
 - b. Kondisi Insfrastuktur
 - c. Aksebilitasi/trasnportasi

- d. Pelayanan publik
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dari Indikator tersebut diatas maka akan dapat tingkat perkembangan pembangunan desa.

2. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Tercatat ada 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan criteria perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Sebagai upaya memenuhi target yang telah ditetapkan untuk mengentaskan daerah tertinggal, berbagai program pemerintah melalui pembuatan program kegiatan akan fokus pada 3 aspek, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek sarana dan prasarana dilakukan pembangunan jalan non status/jalan strategis, pembangunan pasar kecamatan, pembangunan listrik pedesaan, pembangunan jembatan antar desa, pembangunan sarana air bersih masyarakat, pembangunan jaringan irigasi dan pembangunan dermaga. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia dilakukan pembangunan ruang kelas baru, kegiatan belajar mengajar masyarakat, laboratorium sekolah, pembangunan Puskesmas, pemenuhan alat kesehatan Puskesmas, dan pelatihan tenaga kerja baru. Kemudian pada aspek pertumbuhan ekonomi dilakukan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian, bantuan usaha UMKM, bantuan pengembangan peternakan modern, dan pembangunan kebun buah di daerah tertinggal. (Sumber : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).

3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat

berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Ekonomi Keluarga. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Ekonomi Keluarga disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha ekonomi keluarga, antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi

b. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
 3. Pungutan Liar
 4. Implikasi Otonomi Daerah
 5. Implikasi Perdagangan Bebas
 6. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
 7. Terbatasnya Akses Pasar
 8. Terbatasnya Akses Informasi
4. Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak merupakan dasar yang penting dalam perkembangan masyarakat. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pencapaian millenium Development Goals (MDGs) tahun 2016.
5. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Provinsi Jambi pada Tahun 2013 (277.740), tahun 2014 (263.800) dan tahun 2015 (162.779). (Sumber : Jambi Dalam Angka, 2015)
6. Untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditingkatkan melalui ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana

tersebut. Capaian IPM Provinsi Jambi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2013 (67,76%), tahun 2014 (68,24%) dan tahun 2015 (68,89%) dengan perbandingan capaian IPM Nasional pada tahun 2013 (68,31%), tahun 2014 (68,90%) serta tahun 2015 (69,55%). Meskipun capaian IPM Provinsi Jambi dibawah capaian IPM Nasional, perbedaan capaian IPM Provinsi Jambi tidak terlampau jauh dari capaian IPM nasional, dan Provinsi Jambi pada Tahunan 2015 berada di Peringkat 17 secara nasional. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015)

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Secara umum, pembangunan gender Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2013 (87,69%), 2014 (87,88%) dan 2015 (88,44%). Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya, namun capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi tetap dibawah capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional pada tahun 2013 (90,19%), tahun 2014 (90,34%), dan tahun 2015 (91,83%). (Sumber : Berita Resmi Statistik No.05/10/08Th.I)
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Secara umum, pemberdayaan gender Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2015 (64,22%) dapat dilihat pada Keterlibatan Perempuan di Parlemen (14,55%), Perempuan sebagai Tenaga Profesional (48,66%) dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (28,82%). Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi mengalami peningkatan di setiap tahunnya, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jambi masih berada dibawah capaian Indeks Pemberdayaan Gender Nasional Tahun 2015 (70,83%). (Sumber : Berita Resmi Statistik No.05/10/08Th.I)

9. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll

10. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
11. Kasus KDRT dalam Provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 444 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 140 Kasus. Jika dibandingkan dengan kasus KDRT Nasional pada tahun 2013 sebanyak 9.837 kasus, tahun **2014 sebanyak 8.626 kasus, dan kasus 2016 sebanyak 11.207 kasus.**

(Sumber : UPTD PPA Provinsi Jambi).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran OPD

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi adalah:

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama ini yaitu

1. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
 2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak.
2. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua ini yaitu

1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif;
 3. Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa.
3. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga ini yaitu Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi.

Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,63	27,63	30,0	30,0	30,0	30,0
		Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	36,3	36,3	54,4	72,7	81,8	100
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	36,59	50,53	92,99	100	100	100
		Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	2,0	3,0	6,0	20,0	45,0	100,0
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	5,93	5,93	6,2	7,0	10,0	12,0
3.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2.28	2.26	2.23	2.21	2.18	2.15

2.1.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP3) Provinsi Jambi bersama instansi terkait dan atas dukungan dan partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP3) Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Makan dan Minum;
- j. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Mebeleur;
- b. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor.

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- d. Evaluasi Pelaksanaan PUG;
- e. Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan;
- f. Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- g. Pembinaan organisasi perempuan;
- h. Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak;
- i. Komunikasi, informasi dan Edukasi mengenai perlindungan anak;
- j. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT.

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan dan perlombaan Desa/kelurahan;
- b. Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan Adat Daerah dan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

8. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG;
- b. Pembinaan dan Penilaian P2WKSS;
- c. Penguatan Pendampingan di Perdesaan;
- d. Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu;
- e. Penguatan Kapasitas Pengelolaan BumDesa;
- f. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang Usaha ekonomi produktif;
- g. Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu.

9. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan Kampung KB;
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan;
- c. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR).

2.1.2 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan pernyataan komitmen yang merefresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP3) Provinsi Jambi T.A 2018 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	2.	3.	4.
1.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	30 %
	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	54,4 %
2.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	92,99 %

	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0 %
		Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	6,0 %
	Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	6,2 %
3.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2.23 %

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

2.2. Indikator Kinerja Sasaran APBN

Sumber Dana Dekonsentrasi Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 dengan DIPA Nomor SP DIPA - 067.03.10.350163/2018 tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 48.279.236.000.- berasal dari RM dan PHLN.

Sumber Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, nomor DIPA : SP DIPA- 047.01.1000.100040/2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.130.800.000,- (RM) (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Indikator kinerja sasaran akan dicapai secara nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran APBN
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			47,985,236,000,-
1. Jumlah Pendamping Desa yang di Rekrut	777 Orang	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	34,947,833,000,-
		1. Sekretariat Provinsi ;	1,067,400,000,-
		2. Pemdamping Desa;	30,543,703,000,-
		3. Rapat Koordinasi Provinsi;	1,724,468,000,-
		4. FGD Tenaga Pendamping	73,476,000,-

		Profesional Teladan;	
		5. FGD Pemanfaatan Dana Desa Terbaik;	99,748,000,-
		6. Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional;	150,838,000,-
		7. Kajian Roadmap Pendampingan Desa;	500,000,000,-
		8. Pelatihan Praturgas PLD;	201,770,000,-
		9. Rakor Pengendalian dan Pengawasan Dana Desa;	346,810,000,-
		10. Pelatihan Praturgas PDTI	239,620,000,-
2. Program Inovasi Desa	10 Kab		13,037,403,000,-
		1. Dukungan Pelaksanaan PID;	95,600,000,-
		2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas PLD;	1,554,454,000,-
		3. Sosialisasi Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) tingkat Provinsi Jambi dan Rakor PID;	284,560,000,-
		4. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Kewirausahaan;	223,794,000,-
		5. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Infrastruktur;	223,794,000,-
		6. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang SDM;	223,794,000,-

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Prov. Jambi Tahun 2018

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran APBN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.130.800.000,-
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,00 Indeks		
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,44 Indeks		
3. Prevalensi KtP (termaksud TPPO)	33,4 %		
4. Jumlah Kasus KtP (termaksud TPPO)	9640 Kasus		
5. Persentase Korban KtP (termaksud TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %		
		1. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	432.635.000,-
		2. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	294.484.000,-
		3. Penguatan Kelembagaan dan Fasitasi Layanan Korban KtP/A	400.680.000,-

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Prov. Jambi Tahun 2018

2.3. Rencana Strategis

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomot 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD Tujuan, Strategi dan kebijakan yang tertuang didalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran Program yang di tetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi menyusun

dan menetapkan RENSTRA DP3AP2 Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD. Gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan Sistem Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Rencana Strategis DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Yang Mengacu Pada RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						PROGRAM
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,63	27,63	30,0	30,0	30,0	30,0	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	36,3	36,3	54,4	72,7	81,8	100	
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	36,59	50,53	92,99	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
		Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	2,0	3,0	6,0	20,0	45,0	100,0	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	5,93	5,93	6,2	7,0	10,0	12,0	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa DAN Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.	Menurunnya rata-rata	Menurunnya Total	Total Fertility Rate (TFR)	2.28	2.26	2.23	2.21	2.18	2.15	Program

	laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi									Pengendalian Penduduk
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2 Tahun 2016-2021.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Target dan Realisasi kinerja APBD Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pencapaian Kinerja APBD Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	30,00 %	28,54 %	95,13 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,0 %	100 %	100 %
Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	54,4 %	36,36 %	66,83 %
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	92,99 %	59,04 %	63,49 %
Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100,0 %	100 %	100 %
	Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	6,0 %	30,6	510 %
Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	6,2 %	6,5 %	104,83 %

Menurunya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2.23 %	2.23 %	100 %
Persentase Rata-Rata				105,27%

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum persentase rata-rata pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis tahun 2018 adalah sebesar 105,27 %. Kondisi ini dapat tercapai karena adanya peningkatan dari indikator sasaran persentase Peningkatan kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG yang ditargetkan sebesar 6,0 % sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 30,6 %. dalam penentuan target dilihat dari kondisi/data tersedia pada tahun 2018 dan realisasi capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%, tetapi hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
3. Dengan terbitnya Pergub tersebut diatas dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran tahun 2018 tidak dapat terpenuhi dengan baik melalui dukungan anggaran yang tersedia.

Sedangkan Target dan Realisasi kinerja APBN Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Pencapaian Kinerja APBN Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
--------------------------	---------------	---------------------------	-----------------	------------------

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			47,985,236,000,-	43,881,488,994,-
1. Jumlah Pendamping Desa yang di Rekrut	777 Orang	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	34,947,833,000,-	33,486,965,739,-
		1. Sekretariat Provinsi ;	1,067,400,000,-	960,514,265,-
		2. Pemdamping Desa;	30,543,703,000,-	29,579,574,594,-
		3. Rapat Koordiasi Provinsi;	1,724,468,000,-	1,490,540,000,-
		4. FGD Tenaga Pendamping Profesional Teladan;	73,476,000,-	61,975,000,-
		5. FGD Pemanfaatan Dana Desa Terbaik;	99,748,000,-	84,325,000,-
		6. Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional;	150,838,000,-	97,955,000,-
		7. Kajian Roadmap Pendampingan Desa;	500,000,000,-	483,516,880,-
		8. Pelatihan Pratugas PLD;	201,770,000,-	182,795,000,-
		9. Rakor Pengendalian dan Pengawasan Dana Desa;	346,810,000,-	328,590,000,-
		10. Pelatihan Pratugas PDTI	239,620,000,-	217,180,000,-
2. Program Inovasi Desa	10 Kab		13,037,403,000,-	10,394,523,255,-
		1. Dukungan Pelaksanaan PID;	95,600,000,-	79,221,000,-
		2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas PLD;	1,554,454,000,-	1,395,480,000,-
		3. Sosialisasi Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) tingkat Provinsi Jambi dan Rakor PID;	284,560,000,-	275,980,000,-
		4. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Kewirausahaan;	223,794,000,-	172,870,000,-
		5. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Infrastruktur;	223,794,000,-	155,200,000,-
		6. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang SDM;	223,794,000,-	173,720,000,-
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.130.800.000,-	1.110.110.874,-

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,00 Indeks			
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,44 Indeks			
3. Prevalensi KtP (termaksud TPPO)	33,4 %			
4. Jumlah Kasus KtP (termaksud TPPO)	9640 Kasus			
5. Persentase Korban KtP (termaksud TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %			
		1. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	432.635.000,-	429.730.164,-
		2. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	294.484.000,-	285.522.400,-
		3. Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Layanan Korban KtP/A	400.680.000,-	394.858.310,-

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran melalui pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		Persentase Capaian	
		2017	2018	2017	2018
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,63 %	27,63 %	100 %	95,13 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100,0 %	100 %	100 %

Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	36,3 %	36,3 %	100 %	66,83 %
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	50,53 %	50,53 %	100 %	63,49 %
Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	100 %	100,0 %	100 %	100 %
	Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	3 %	3,0 %	100 %	510 %
Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	5,93 %	87,0 %	100 %	104,83 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,26 %	2,26 %	100 %	100 %
Persentase Rata-Rata				100 %	105,27 %

Dapat dilihat melalui realisasi perbandingan tahun 2017 dan 2018 capaian Kinerja Dinas mengalami peningkatan dan juga terdapat beberapa capaian kinerja yang masih dibawah target kinerja yang harus dicapai Tahun 2018, dimana rata-rata persentase perbandingan di Tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,27 % di tahun 2018.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DP3AP2 Provinsi Jambi, dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Akhir Renstra	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	(1) Persentase Indeks Pembangunan Gender	%	90.00		91.02		92.02		93.03		94.00		95.01		95.01	
		(2) Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	%	62.01		63.01		64.00		65.00		66.01		67.01		67.01	
		(3)Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-Laki	%	47,10		46,60		46,00		45,70		45,50		45,00		45,00	
		(4) Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan	%	35,00		34,90		34,80		34,70		34,60		34,50		34,50	
	Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti system advokasi tindak pidana perdagangan	Orang	40	-	60	-	70	-	85	-	100	-	125	-	480	-

Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perlindungan anak	Jumlah pelatih pendampingan KDRT	Orang	20	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	170	-
Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak	orang	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	180	-
kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah Ranperda Anti Trafiking	Ranperda	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Kab. Advokasi tindak pidana perdagangan	Tim Gugus Tugas	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-
Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah data terpilah gender	buku	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-

Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Persentase Operasional P2TP2A	Persentase dari jumlah pelapor	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan korban KDRT	Jumlah petugas pencatat dan pelaporan penanganan KDRT	orang	30	-	30	-	50	-	80	-	100	-	150	-	440	-
Kegiatan penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah penyusunan profil penangan tindakan kekerasan terhadap perempuan	buku	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-
Kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah operasional rumah aman bagi korban KDRT	Kab/Kota	11	11	1	11	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah peserta bimtek PPGR dan Vokal Point di SKPD	Vokal point di SKPD	-	-	100	-	150	-	200	-	250	-	300	-	1.000	-
Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan	Jumlah peserta pemetaan potensi organisasi	lembaga	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-	seluruh organisasi/lembaga	-

lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak				a		ga		ga		ga		ga		ga	
Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender	Jumlah peserta per-Kab/Kota yang mengikuti pengetahuan masyarakat tentang ketahanan keluarga	orang/ Kab/Kota	33 orang/ 11 Kab/Kota	33 orang/11 Kab/Kota	33 orang /11 Kab/Kota	-	33 orang /11 Kab/Kota	-	33 orang /11 Kab/Kota	-	33 orang /11 Kab/Kota	-	33 orang /11 Kab/Kota	-	33 orang /11 Kab/Kota	-
Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah proses evaluasi pelaksanaan PUG	kali	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-
Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta peran wanita dalam bidang politik	orang	0	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-
Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	orang	0	-	50	-	80	-	80	-	80	-	80	-	370	-

Bidan Perlu ndu nga n Ana k	Kegiatan pembinaan penilaian perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan. Gerakan Sayang Ibu dan kelompok perempuan peduli lingkungan	Jumlah kabupaten pembina tenaga kerja perempuan	Kab/Kota	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	Jumlah organisasi perempuan (Dharma Wanita dan BKOW)	organisasi	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	(1) Persentase Indeks Pembangunan Gender	%	90.00		91.02		92.02		93.03		94.00		95.01	
		(2) Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	%	62.01		63.01		64.00		65.00		66.01		67.01	
		(3) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-laki	%	47.10		46.60		46.00		45.70		45.50		45.00	
		(4) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	%	35.00		34.90		34.80		34.70		34.60		34.50	

Kegiatan penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan anak	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	orang	40	40	50	75	60	-	70	-	80	-	90	-	390	-
Kegiatan pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak	Jumlah anak yang mengikuti jambore untuk pengembangan tumbuh kembang anak	orang	40	40	40	40	40	-	40	-	40	-	40	-	240	-
Kegiatan jambore, Aksi Anak se Provinsi Jambi	Jumlah peserta kegiatan jambore, Aksi Anak se Provinsi Jambi	orang	-	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	275	-
Kegiatan sosialisasi terhadap akta bebas biaya	Jumlah peserta sosialisasi akta bebas biaya	orang	70	-	125	-	125	-	125	-	125	-	125	-	695	-
Kegiatan pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah peserta pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Kab/Kota	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kegiatan	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

Kegiatan pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti Sistem Informasi Gender dan Anak	Orang	175	175	175	175	175	-	175	-	175	-	175	-	1050	-
Kegiatan komunikasi, informasi, dan Edukasi mengenai perlindungan anak	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	orang	210	210	210	84	210	-	210	-	210	-	210	-	1260	-
Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Jumlah Peserta sosialisasi kepemilikan Akta kelahiran anak	orang	50	-	80	-	90	-	100	-	120	-	130	-	570	-
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak dlm masa orientasi siswa	Jumlah anak smp/sma/ sederajat yang mendapat sosialisasi	orang	100	-	200	-	300	-	300	-	300	-	300	-	1500	-
kegiatan Sosialisasi GN-AKSA bagi pelajar/ sederajat	jumlah peserta yang mengikuti GN - AKSA	orang	50	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	350	-
Kegiatan Bintek penanganan tindak kekerasan terhadap guru BK, Agama, dan Olahraga	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi	orang	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	240	-

BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan PATBM 9 kab/kota se-prov jambi	Jumlah peserta PATBM	orang	60	1-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	360	-
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang telah diberi Bimtek RPJMDes dan Pengelolaan Keuangan	Kab/Kota	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
	Kegiatan Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih	orang	400	400	200	200	200	-	200	-	200	-	200	-	1.400	-
	Kegiatan Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah peserta aparatur desa yang terlatih dlm bidang manajemen	orang	-	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1.000	-
	Kegiatan bintek penyusunan profil desa	Persentase data desa dalam database profil desa menuju tertib administrasi pemerintahan desa	%	95	95	100	-	100	-	100	-	100	-	300	-	100	-

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa/Kelurahan	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Desa/Kelurahan terbaik	Kab/Kota	11	11	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Persentase desa di Prov.Jambi yg mencapai kategori tertinggi yaitu desa/kelurahan cepat berkembang	%	10	-	15	-	20	-	25	-	30	-	30	-	130	-
kegiatan bintek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa	Jumlah peserta Bintek penataan desa bagi Aparatur Desa dan pemerintah supra desa	orang	100	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1.100	-
Kegiatan bintek penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta aparatur dalam penyusunan perencanaan	orang	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-
kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan Desa (Perdes)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Produk hukum yang sesuai aturan	orang	0	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1.000	-
Kegiatan fasilitasi penataan	Jumlah peserta aparatur	orang	0	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	750	-

desa	penataan desa															
kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat	Jumlah peserta pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat . Dalam penyusunan program /kegiatan	orang	330	-	330	-	330	-	330	-	330	-	330	-	1.980	-
Kegiatan rakor pemerintah an desa	Jumlah peserta pembinaan peserta rakor	orang	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500	-
Kegiatan Bimtek penguatan kelembagaan pemerintah supra desa	Jumlah peserta Bimtek penguatan kelembagaan pemerintahan supra desa	orang	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	1.200	-
Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan	jumlah peserta penguatan kapasitas aparatur desa dan pemerintah supra desa dalam bidang pemerintahan umum, kewilayahan dan pembinaan kemasyarakatan	orang	350	-	350	-	350	-	350	-	350	-	350	-	2.100	-
Kegiatan penguatan kapasitas dan fungsi Badan	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan fungsi Badan	orang	270	-	270	-	270	-	270	-	270	-	270	-	1.620	-

	Permasyarakatan Desa	Permasyarakatan Desa															
	Kegiatan operasional pemantauan pelaksanaan dana desa	Persentase operasional pemantauan pelaksanaan dana desa	%	20	-	50	-	75	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa	Jumlah Peserta penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan kelembagaan desa	orang	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-	2.400	-
	Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	Jumlah Tenaga pelatih pelatihan masyarakat	orang	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	180	-
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	%	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan																

DES A																	
	Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDES	Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek penguatan kapasitas pengelolaan BUMDES	Orang	40	40	60	60	105	-	250	-	350	-	500	-	1.200	-
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES	Jumlah peserta pembinaan BUMDES	Orang	40	-	100	-	150	-	200	-	250	-	300	-	1.040	-
	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah tenaga pengelolaan pasar desa	Orang	100	-	100	-	150	-	200	-	250	-	300	-	1.100	-
	Bimtek Pengembangan Usaha BUMDES	Jumlah peserta Bimtek pengembangan usaha BUMDES	Orang	100	-	100	-	150	-	200	-	250	-	300	-	1.100	-
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan BUMDES	Jumlah Kelembagaan BUMDES	Kab/Kota	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
	Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah tenaga perempuan yang terlatih dalam pengembangan ekonomi produktif peningkatan pendapatan ekonomi keluarga	Orang	100	100	320	320	40	-	100	-	200	-	500	-	950	-

Kegiatan Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan Adat daerah dan masyarakat hukum adat (PMA)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki nilai-nilai Kegotongroyongan dalam BBGRM dan Adat Daerah	Kab/Kota	11	11	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Remaja Putri Putus Sekolah di Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan remaja putri putus sekolah di perdesaan	Orang	350	-	350	-	400	-	450	-	500	-	550	-	2.600	-
Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam Program Inovasi Desa	Kab/Kota	-	-	-	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
Kegiatan Pembinaan TTG dan Posyantek	Kelompok TTG dan Posyantek di Kecamatan	Kab/Kota	11	11	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa	Jumlah Kabupaten peserta kelompok masyarakat yang terbina	Kab/Kota	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu Lansia dan Komda Lansia	Jumlah kabupaten terbentuknya posyandu lansia dan komda lansia	Kab/Kota	11	11	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-

	Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu	Jumlah Peserta pembinaan untuk revitalisasi pokjanel posyandu	orang	45	45	80	80	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-
	Kegiatan Penguatan Pendamping di Perdesaan	Jumlah kabupaten dengan tenaga profesional untuk pendamping desa	Kab/Kota	10	10	10	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan Desa Hijau	Jumlah kelompok tani di desa hutan untuk melestarikan lingkungan hutan	Orang	30	1-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
	Kegiatan Pameran Hasil Karya di Bidang Pembangunan/ Jambore	Jumlah Tenaga pelatih di bidang industri rumahan	Kali/Keg.	3	250.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000	3	2.500.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pembinaan P2WKSS	Kab/Kota	11	11	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	-	-	2.04%	1.98%	1.91%	1.82%								
		Persentase PUS Anggota POKTAN yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	%	77.00		78.00		79.00		80.00		81.00		82.00		82.00	

	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	7.00		6.55		6.10		5.65		5.30		5.15		5.15	
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	68.40		68.80		69.20		69.60		70.00		70.50		70.50	
	Angka Kelahiran Total (TFR 15 -49 Tahun)	WUS/J lh Kelahir an	2.28		2.26		2.23		2.21		2.18		2.15		2.15	
	Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 Tahun)	Per 1000 Kelahir an	71.00		69.00		67.00		65.00		60.00		50.00		50.00	
	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 Tahun)	%	13.30%		11.80 %		9.40%		7.10%		6.00%		5.50%		5.50%	
Penguatan kelembagaa n Komda Lansia	Jumlah terlaksananan ya program komda Lansia	Kab/K ota	-	-	11	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan penguatan advokasi pengendalia n penduduk dan KB	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang	-	-	200	-	250	-	300	-	300	-	350	-	1.400	-
Kegiatan rakor penyerasian kebijakan kependudu kan KB dan kespro	Jumlah peserta rakor	orang	-	-	200	-	250	-	300	-	300	-	350	-	1.400	-

Kegiatan Peningkatan Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi		Kab/Kota	-	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan peningkatan peran serta KB Pria (Vasektomi) dalam pengendalian penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti	Kab/Kota	-	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Pembinaan pembentukan kampung KB	Jumlah kampung KB	Kab/Kota	-	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
Kegiatan Fasilitasi sosialisasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah peserta sosialisasi	orang	-	-	200	-	250	-	300	-	300	-	350	-	1.400	-
Kegiatan Fasilitasi sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan Monev	Jumlah peserta sosialisasi dan Faskes	orang	-	-	200	-	250	-	300	-	300	-	350	-	1.400	-
Kegiatan Fasilitasi sosialisasi Pemeriksaan dini kanker reproduksi dengan IVA	Persentase kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan dini	%	-	-	60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-
Kegiatan Fasilitas	Jumlah peserta	orang	-	-	200	-	250	-	300	-	300	-	350	-	1.400	-

	Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV/AIDS melalui Kespro																
	Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah peran pokjanal Posyandu	Kab/Kota	-	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
SEKRETARIAT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun/lembar (Perangko,materai)	Lembar	500	4,800,000	1250	5,700,000	1450	6,600,000	1650	7,500,000	1850	8,400,000	2050	9,300,000	8750	42,300,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Periode pembayaran rekening (bulan)	Bulan	12	103,000,000	12	133,000,000	12	163,000,000	12	193,000,000	12	223,000,000	12	253,000,000	12	1,068,000,000
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	orang	37	171,759,000	37	200,000,000	39	220,000,000	39	240,000,000	40	270,000,000	40	300,000,000	40	1,401,759,000
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Bulan	12	85,000,000	12	105,000,000	12	125,000,000	12	145,000,000	12	165,000,000	12	185,000,000	12	810,000,000
	kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Jenis	59	158,333,950	75	180,000,000	90	200,000,000	105	220,000,000	120	240,000,000	135	260,000,000	135	1,258,333,950

kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang dan cetakan	Jenis	16	46,604,750	30	70,000,000	45	85,000,000	60	100,000,000	75	115,000,000	90	130,000,000	90	546,604,750
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Jenis	11	17,782,000	20	30,000,000	30	40,000,000	40	50,000,000	50	60,000,000	60	70,000,000	60	267,782,000
kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Majalah/Koran	5	7,500,000	6	9,500,000	7	11,500,000	8	13,500,000	9	15,500,000	10	17,500,000	10	75,000,000
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat	jumlah peserta rapat/tamu dll	Kali/kegiatan	8	20,000,000	8	20,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	45,000,000	10	45,000,000	10	210,000,000
kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan daerah	Bulan	12	436,319,200	12	600,000,000	12	650,000,000	12	700,000,000	12	750,000,000	12	800,000,000	12	3,936,319,200
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	0	0	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	500,000,000

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Unit	0	0	21	50,000,000	21	50,000,000	22	60,000,000	22	60,000,000	22	70,000,000	22	290,000,000
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	0	0	10	50,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	400,000,000
kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Unit	0	0	8	50,000,000	8	50,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	15	120,000,000	15	420,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Unit	11	47,929,940	10	70,000,000	10	70,000,000	10	90,000,000	10	110,000,000	10	130,000,000	61	517,929,940
kegiatan pengadaan meubeler	Jumlah pengadaaan meubeler	Unit	0	0	10	50,000,000	10	70,000,000	10	90,000,000	10	110,000,000	10	130,000,000	50	450,000,000
kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	1	83,200,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	140,000,000	1	150,000,000	6	703,200,000
kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	Unit	19	250,680,000	21	300,000,000	22	400,000,000	24	500,000,000	25	600,000,000	26	700,000,000	26	2,750,680,000

kendaraan dinas/operasional	onal															
kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	115	80,900,000	125	100,000,000	135	120,000,000	145	145,000,000	155	155,000,000	165	165,000,000	165	765,900,000
Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Unit	0	0	2	600,000,000	2	600,000,000	3	700,000,000	3	700,000,000	3	800,000,000	3	3,400,000,000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	0	0	10	80,000,000	10	80,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	150,000,000	65	510,000,000
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Paket	0	0	1	20,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	5	200,000,000
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat pagar kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat pagar kantor	Paket	0	0	1	20,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	5	200,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	orang	90	36,000,000	95	38,000,000	100	40,000,000	105	42,000,000	110	46,000,000	115	50,000,000	115	252,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya																
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	orang	50	65,000,000	50	65,000,000	50	70,000,000	50	75,000,000	50	80,000,000	50	85,000,000	300	440,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
Kegiatan penyusunan laporan , evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan kinerja SKPD	Jumlah laporan , evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan	laporan /Kegiatan	15 jenis/1 laporan /3x rakor	224,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	250,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	275,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	265,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	280,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	300,000,000	15 Jenis laporan /3x rakor / monev	1,594,000,000

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

iv. Analisis Keberhasilan dan Hambatan

1. Keberhasilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) urusan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut:
 - Penanganan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP) P2TP2A Provinsi Jambi Tahun 2018 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang terjadi peningkatan dibandingkan dengan jumlah Pengaduan Kekerasan di Tahun 2017 sebanyak 107 (seratus tujuh) orang;
 - Tercapainya Anggaran yang ber-Responsif Gender telah dilaksanakan oleh seluruh OPD di Provinsi Jambi;
 - Terbinanya Organisasi Wanita yaitu BKOW dan DWP Provinsi Jambi;
 - Terlaksananya Sosialisasi Politik Perempuan terhadap kader-kader perempuan di Provinsi Jambi;
 - Terlaksananya beberapa Peringatan Besar di Provinsi Jambi antara Lain:
 1. Peringatan Hari Anak Nasional;
 2. Peringatan Hari Ibu;
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut:
 - Terbinanya Kampung KB di Provinsi Jambi;
 - Tersedianya Pemuktahiran Data Pengendalian Penduduk di Provinsi Jambi.

3. Urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut:

- Terlaksananya dan terpilihnya Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi sebagai berikut:

No.	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Poin
Tingkat Desa				
1.	Dataran Kempas	Tebing Tinggi	Tanjab Barat	572 (1)
2.	Lingga Kuamang	Pelepat Ilir	Bungo	557 (2)
3.	Mendalo Darat	Jambi Luar Kota	Muaro Jambi	519 (3)
Tingkat Kelurahan				
1.	Beringin	Pasar	Kota Jambi	510 (1)
2.	Talang Babat	Muara Sabak	Tanjab Timur	395 (2)
3.	Sukasari	Sarolangun	Sarolangun	393 (3)

- Terlaksananya Puncak BBGRM Tingkat Provinsi Jambi; dan
- Terlaksananya 10 Program PPK di Provinsi Jambi.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Memiliki keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut:

- Pencapaian realisasi Pencairan Dana Desa Tahun 2018 sebesar 99,33 %;
- Tersedianya Pendamping Desa sebanyak 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang;
- Terlaksananya Posyantek dan Gelar TTG Tk.Provinsi Jambi

Prestasi Penyelenggaraan Urusan dari ke 4 (empat) urusan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.5

Keberhasilan/Prestasi Per-Bidang Urusan

No.	Urusan	Keberhasilan/Prestasi	Ket.
1.	2.	3.	4.
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi; 2. Penghargaan Kepada Plt. Gubernur Jambi sebagai Inisiator Provinsi Jambi menuju Provinsi Layak Anak (Provila) Penghargaan diberikan oleh Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada bertempat di Jambi tanggal 4 November 2018; 3. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya; 4. Penghargaan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam rangka Pembuatan Film Pendek.	
2.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	
3.	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Lomba Pelaksanaan terbaik Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Kategori PAKARTI MADYA I Dimenangkan oleh Kabupaten Merangin Kecamatan Tabir Hilir Desa Air Batu; 2. Lomba Pelaksanaan Terbail PHBS Kategori Kota Dimenangkan oleh Kota Jambi Kecamatan Danau Sipin Kelurahan Sungai Putri; 3. Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang Kategori Pakarti Utama II Dimenangkan oleh Kabupaten Tebo Kecamatan Rimbo Ulu Desa Wanareja; 4. Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kategori Prakarti Utama Dimenangkan oleh Kabupaten Muara Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota Desa Mendalo Laut; 5. Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) Kategori Prakarti Utama Dimenangkan oleh Kota Sungai Penuh Kecamatan Tanah Kampung Desa Koto Pudung; 6. Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test Kategori Prakarti Utama Dimenangkan oleh Kota Bungo Kecamatan Jujuhan Hilir; 7. Juara I Parade Nusantara dengan Kriteria instrument/musik Pengiring Tarian dalam Rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-46 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018.	
4.	Pemberdayaan	-	

	Masyarakat Pedesaan		
--	------------------------	--	--

2. Hambatan

Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
3. Rendahnya dukungan atau komitmen Kab/Kota dalam pengiriman Anak untuk mengikuti Kegiatan Forum Anak Daerah karena belum terbentuknya Forum Anak di Kab/Kota tersebut;
4. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

3. Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data;
2. Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kepada Kab/Kota di Provinsi Jambi;
4. Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di kabupaten-kabupaten lain.

3.1.5 Analisis Sumber Daya

Efisiensi pada penggunaan sumber daya yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi baik dari sumber daya manusia yang tersedia dapat dilihat melalui analisis sumber daya dengan komposisi sebagai berikut :

a. Kualifikasi Pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN (orang)		
		2016	2017	2018
1	S D	-	-	
2	S L T P	1	-	
3	S L T A	11	11	
4	D I	1	1	
5	D III / Sarjana Muda	6	5	
6	D IV / Strata 1	52	54	
7	Pasca Sarjana (S2)	9	9	
8	Doktor (S3)	-	-	
Jumlah		80	80	

b. Pangkat dan Golongan

No.	PANGKAT/GOL/RUANG		TAHUN (orang)		
			2016	2017	2018
1	Juru Muda	I/a	-	-	
2	Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	
3	Juru	I/c	-	-	
4	Juru Tk. I	I/d	-	-	
5	Pengatur Muda	II/a	-	1	
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	1	
7	Pengatur	II/c	1	1	
8	Pengatur Tk. I	II/d	3	2	
9	Penata Muda	III/a	4	4	
10	Penata Muda Tk. I	III/b	24	24	
11	Penata	III/c	12	11	
12	Penata Tk. I	III/d	21	21	
13	Pembina	IV/a	7	8	
14	Pembina Tk. I	IV/b	6	7	
15	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	
16	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	
17	Pembina Utama	IV/e	-	-	
Jumlah			80	80	

b. Jumlah Pejabat Struktural

NO	JABATAN	TAHUN (ORANG)			KETERANGAN
		2016	2017	2018	
1	Eselon II.A	1	1	1	Kepala Badan Sekretaris/Kabid Kasubbag/Kasubbi d
2	Eselon III.A	6	6	6	
3	Eselon IV.A	18	18	18	
4	Pejabat Fungsional	-	-	-	
Jumlah		20	20		

Melalui analisis sumber daya di atas adanya peningkatan baik dari jumlah pegawai dan terisinya seluruh jabatan eselon pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, hal ini jelas sangat mendukung terlaksananya program dan kegiatan di Tahun 2018 sehingga indikator sasaran kinerja di Tahun 2018 dapat tercapai dan terlaksananya dengan baik seluruh program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan

Analisis Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat dari capaian realisasi target Program dan kegiatan Tahun 2018 dan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel.3.6
Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2018 DP3AP2 Provinsi Jambi

SASARAN		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN				Realisasi Per-Triwulan (%)	KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	tw 1 : 25 % tw 2 : 25 % tw 3 : 25 % tw 4 : 25 %	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah Vocal Point dan PUG, Terwujudnya Anggaran Responsife Gender dan Keikutsertaan dalam Penghargaan APE	%	tw 1 : 20 % tw 2 : 60 % tw 3 : 20 % tw 4 : -	6.00 58.00 26.00 10.00	
				Pembinaan Organisasi Perempuan	Terbinanya Organisasi Perempuan (DWP dan BKOW)	%	tw 1 : 30 % tw 2 : 40 % tw 3 : 15 % tw 4 : 15 %	6.00 30.00 19.00 45.00	
				Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan	Perempuan dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dalam politik dan Pemerintahan	%	tw 1 : - tw 2 : - tw 3 : 100 % tw 4 : -	0.00 0.00 100.00 0.00	
			Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	Terpilihnya pemenang lomba P2WKSS	%	tw 1 : - tw 2 : 10 % tw 3 : 90 % tw 4 : -	0.00 5.00 5.00 90.00	
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlayannya Korban KDRT terhadap anak dan perempuan yang melapor ke P2TP2A	%	tw 1 : 20 % tw 2 : 40 % tw 3 : 20 % tw 4 : 20 %	8.00 30.00 22.00 40.00	
				Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlindunginya Korban KDRT bagi perempuan dan anak di Rumah Aman	%	tw 1 : 20 % tw 2 : 40 % tw 3 : 20 % tw 4 : 20 %	11.00 50.00 11.00 28.00	
				Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Meningkatnya pengetahuan dan Pemahaman SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	%	tw 1 : 70 % tw 2 : 30 % tw 3 : - tw 4 : -	79.00 0.00 21.00 0.00	

Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terbentuknya Pokja Perlindungan dan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak	%	tw 1 : 70 % tw 2 : 30 % tw 3 : - tw 4 : -	5.00 5.00 20.00 70.00	
				Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Terbentuknya Kota Layak Anak	%	tw 1 : 30 % tw 2 : 50 % tw 3 : 20 % tw 4 : -	20.00 55.00 5.00 20.00	
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Partisipasi Anak serta kepedulian orang dewasa dalam pemenuhan hak-hak anak	%	tw 1 : 10 % tw 2 : 40 % tw 3 : 40 % tw 4 : 10 %	7.00 36.00 57.00 0.00	
				Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	Anak mendapatkan Hak dan Perlindungan dalam Keluarga dan lingkungan	%	tw 1 : 20 % tw 2 : 60 % tw 3 : 20 % tw 4 : -	5.00 2.00 10.00 83.00	
				Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pelaksanaan PATBM di lingkungan	%	tw 1 : 70 % tw 2 : 30 % tw 3 : - tw 4 : -	5.00 10.00 55.00 30.00	
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdesa	Terlaksananya Rakor dan bimtek dalam pengembangan Bumdesa	%	tw 1 : 60 % tw 2 : 40 % tw 3 : - tw 4 : -	20.00 80.00 0.00 0.00	
				Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	jumlah tenaga perempuan yang terlatih dalam bidang pengembangan ekonomi produktif	%	tw 1 : 40 % tw 2 : 60 % tw 3 : - tw 4 : -	0.00 10.00 10.00 80.00	
Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Aparatur Pemdesa yang paham tentang administrasi Desa	%	tw 1 : 40 % tw 2 : 30 % tw 3 : 5 % tw 4 : 25 %	41.00 31.00 5.00 23.00	
				Perberdayaan Nilai-nilai kegotongroyongan, Adat Daerah dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan adat dan budaya daerah	%	tw 1 : 10 % tw 2 : 80 % tw 3 : 10 % tw 4 : -	8.00 52.00 40.00 0.00	

				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	terlaksananya 10 Program Pokok PKK	%	tw 1 : 25 % tw 2 : 25 % tw 3 : 25 % tw 4 : 25 %	10.00 8.00 42.00 40.00	
				Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu	Terlaksananya pembinaan dan Revitalisasi pokjanel posyandu	%	tw 1 : 70 % tw 2 : - tw 3 : 30 % tw 4 : -	10.00 0.00 70.00 20.00	
	Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Meningkatnya sumber daya alam pedesaan dengan adanya TTG	%	tw 1 : 70 % tw 2 : 30 % tw 3 : - tw 4 : -	3.00 5.00 50.00 42.00	
Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa cepat berkembang	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan	Terpilihnya Desa dan Kelurahan terbaik	%	tw 1 : 10 % tw 2 : 80 % tw 3 : 10 % tw 4 : -	7.00 50.00 13.00 30.00	
			Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penguatan Pendampingan di Perdesaan	Tersedianya pendampingan profesional di desa	%	tw 1 : 5 % tw 2 : 40 % tw 3 : 15 % tw 4 : 40 %	4.00 45.00 10.00 41.00	
Meningkatnya Keseimbangan Jumlah Penduduk dan kualitas keluarga	Persentase akseptor KB	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan kampung KB	Meningkatnya Pemahaman tentang Kampung KB	%	tw 1 : 50 % tw 2 : 20 % tw 3 : 10 % tw 4 : 10 %	10.00 60.00 20.00 10.00	
				Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)	Meningkatnya jumlah remaja sadar akan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi	%	tw 1 : - tw 2 : 60 % tw 3 : 30 % tw 4 : 10 %	5.00 6.00 70.00 19.00	
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	tw 1 : 10 % tw 2 : 30 % tw 3 : 30 % tw 4 : 20 %		Pemuktahiran Data Kependudukan	Sinkronisasi data kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga	%	tw 1 : 25 % tw 2 : 25 % tw 3 : 25 % tw 4 : 25 %	20.00 5.00 55.00 20.00	

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

Dari Tabel di atas maka dapat dilihat analisis pencapaian Program dan Kegiatan yang dapat menunjang pencapaian penetapan kinerja masih belum optimal hal ini dikarenakan Pagu Anggaran Tahun 2018 masih belum mencukupi dalam pencapaian target kinerja di Tahun 2018.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran APBD

Sebagai bentuk realisasi keuangan yang transparan dan akuntabel, di bawah ini disajikan capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Realisasi anggaran APBD berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan di DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.3.7
Realisasi Anggaran APBD Tahun 2018

Urusan	No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.848.502.000.00	1.841.218.420.00	100
	1.	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	320.210.000.00	317.981.100.00	100
	2.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	215.815.700.00	214.990.700.00	100
	3.	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	59.800.000.00	58.690.440.00	100
	4.	Evaluasi Pelaksanaan PUG	168.528.900.00	168.528.900.00	100
	5.	Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan	22,252,000.00	21.752.000.00	100
	6.	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	90,342,000.00	90.148.000.00	100
	7.	Pembinaan Organisasi Perempuan	488,295,000.00	488.115.000.00	100
	8.	Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan	102,250,500.00	101.837.320.00	100
	9.	Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak	118,207,500.00	117.589.160.00	100
	10.	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak	129,880,800.00	129.006.200.00	100
	11.	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	133,019,600.00	132.579.600.00	100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	452.788.000.00	443.590.600.00	100
	1.	Pembinaan Kampung KB	193,313,800.00	188.838.200.00	100
	2.	Pemutakhiran Data Kependudukan	74,911,550.00	74.882.450.00	100
	3.	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR)	184,562,650.00	179.869.950.00	100

Pemerintahan Desa dan Kelurahan	III	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	2.734.060.000.00	2.725.696.822.00	100
	1.	Pembinaan dan Perlombaan Desa dan kelurahan	301,336,000.00	301.291.400.00	100
	2.	Kegiatan Pemberdayaan Nilai Nilai Kegotongroyongan, Adat daerah dan Masyarakat Hukum Adat	343,472,000.00	343.221.400.00	100
	3.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	489,252,000.00	488.998.400.00	100
	4.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	1,600,000,000.00	1.592.185.622.00	100
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.063.867.500.00	1.062.991.169.00	100
	1.	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	180,142,000.00	179.892.000.00	100
	2.	Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	182.810.000.00	182.810.000.00	100
	3.	Penguatan Pendampingan di Pedesaan	298,059,500.00	297.699.500.00	100
	4.	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes	195,309,750.00	195.304.969.00	100
	5.	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	87,362,500.00	87.349.800.00	100
	6.	Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu	120,183,750.00	119.934.900.00	100
	V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.138.700.00	770.205.150.00	100
	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3,510,000.00	3.504.000.00	100
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,000,000.00	82.706.336.00	100
	3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.676.600.00	99.310.800.00	100
	4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	80,000,000.00	80.000.000.00	100
	5.	Penyediaan alat tulis kantor	116,138,500.00	116.138.500.00	100
	6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27,015,150.00	27.015.150.00	100
	7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,850,000.00	18.850.000.00	100
	8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000.00	5.340.000.00	100
	9.	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000.00	13.400.000.00	100
	10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	323,948,450.00	323.940.364.00	100
	VI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	476.811.600.00	454.998.380.00	100
	1.	Pengadaan mebeleur	16,049,600.00	16.049.600.00	100
	2.	Pengadaan Perlengkapan Kantor	102,042,000.00	101.725.600.00	100
	3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51,000,000.00	51.000.000.00	100
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	287,720,000.00	266.273.180.00	100
	5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000.00	19.950.000.00	100
	VII	Program peningkatan disiplin aparatur	63.000.000.00	63.000.000.00	100
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	63,000,000.00	63.000.000.00	100
	VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000.00	30.881.000.00	80
	1.	Pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000.00	30.881.000.00	80
	IX	Program Penguatan	303.898.700.00	294.645.800.00	100

		Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	303.898.700.00	294.645.800.00	100
Jumlah Pagu Anggaran			7.790.066.500.00	7.689.227.341.00 (98,68 %)	99,67

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

3.2.2 Realisasi Anggaran APBN

Sebagai bentuk realisasi keuangan yang transparan dan akuntabel, di bawah ini disajikan capaian kinerja keuangan berdasarkan program kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan DP3AP2 Provinsi Jambi. Realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan di DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel.3.8
Realisasi Anggaran APBN

Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			47,985,236,000,-	43,881,488,994,-
a. Jumlah Pendamping Desa yang di Rekrut	777 Orang	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	34,947,833,000,-	33,486,965,739,-
		1. Sekretariat Provinsi ;	1,067,400,000,-	960,514,265,-
		2. Pendamping Desa;	30,543,703,000,-	29,579,574,594,-
		3. Rapat Koordinasi Provinsi;	1,724,468,000,-	1,490,540,000,-
		4. FGD Tenaga Pendamping Profesional Teladan;	73,476,000,-	61,975,000,-
		5. FGD Pemanfaatan Dana Desa Terbaik;	99,748,000,-	84,325,000,-
		6. Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional;	150,838,000,-	97,955,000,-
		7. Kajian Roadmap Pendampingan Desa;	500,000,000,-	483,516,880,-
		8. Pelatihan Praturgas PLD;	201,770,000,-	182,795,000,-
		9. Rakor Pengendalian dan Pengawasan Dana Desa;	346,810,000,-	328,590,000,-
		10. Pelatihan Praturgas PDTI	239,620,000,-	217,180,000,-
b. Program Inovasi Desa	10 Kab		13,037,403,000,-	10,394,523,255,-
		1. Dukungan Pelaksanaan PID;	95,600,000,-	79,221,000,-
		2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas PLD;	1,554,454,000,-	1,395,480,000,-

		3. Sosialisasi Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) tingkat Provinsi Jambi dan Rakor PID;	284,560,000,-	275,980,000,-
		4. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Kewirausahaan;	223,794,000,-	172,870,000,-
		5. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang Infrastruktur;	223,794,000,-	155,200,000,-
		6. Orientasi Tugas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bidang SDM;	223,794,000,-	173,720,000,-
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			1.130.800.000,-	1.110.110.874,-
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,00 Indeks			
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,44 Indeks			
3. Prevalensi KtP (termaksud TPPO)	33,4 %			
4. Jumlah Kasus KtP (termaksud TPPO)	9640 Kasus			
5. Persentase Korban KtP (termaksud TPPO) yang mendapat pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %			
		1. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	432.635.000,-	429.730.164,-
		2. Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	294.484.000,-	285.522.400,-
		3. Penguatan Kelembagaan dan Fasitasi Layanan Korban KtP/A	400.680.000,-	394.858.310,-

Sumber: Subbag Program DP3AP2 Provinsi Jambi Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 105,27%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Jambi.

KEPALA DINAS

Dra. LUTHPIAH
Pembina Tk.I

Nip. 19691215 198908 2 002

LAMPIRAN